

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2016-2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**2018**

## **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) :
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 :
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
11. Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 ;
13. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang kedudukan Susunan Organsiasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Lombok Tengah ;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 9 );

#### **B. RENCANA KEGIATAN 2018**

Rencana pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Tindak lanjut kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan dan penerapan Analisis Jabatan (Anjab) Lingkup BKPP	Jumlah unit kerja yang telah menyusun analisa jabatan ; Target : 16 Jabatan	a. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja b. Menyusun formulir urutan jabatan c. Mengumpulkan data mengenai suatu jabatan d. Mengumpulkan data dengan menghasilkan deskripsi dan spesifikasi jabatan e. Melakukan Analisis Jabatan dan menyusun Uraian Jabatan	Telah dilaksanakan dengan baik Telah dilaksanakan dengan baik Telah dilaksanakan dengan baik Telah dilaksanakan dengan baik Telah dilaksanakan dengan baik	Terkoordinir oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah

			f. Sosialisasi jabatan dan substansi Uraian Jabatan	Telah dilaksanakan dengan baik	
			g. Implementasi Uraian Jabatan	Telah dilaksanakan dengan baik pada beberapa jabatan	
			h. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak/perubahan atas implementasi Analisa Jabatan	Belum dapat dilaksanakan	
2	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Lingkup BKPP	Indikator : Jumlah unit kerja yang telah menyusun Analisis Beban Kerja ; Target : 44 Jabatan	a. Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Telah dilaksanakan dengan baik	Terkoordinir oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah
			b. Melakukan pengumpulan data	Telah dilaksanakan dengan baik	
			c. Melakukan pengolahan data	Telah dilaksanakan dengan baik	
			d. Menelaah hasil olahan data	Telah dilaksanakan dengan baik	
			e. Menerapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Telah dilaksanakan dengan baik	
			f. Sosialisasi atas hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Telah dilaksanakan dengan baik	
			g. Implementasi atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Telah dilaksanakan dengan baik pada beberapa jabatan	
			h. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai / pejabat, jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit kerja dan standar norma waktu kerja	Belum dapat dilaksanakan	
3	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan Lingkup BKPP	Indikator : Jumlah unit kerja yang telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Target : 1 Jabatan	a. Review uraian tugas dan kriteria kerja	Telah dilakukan penyusunan SKJ pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai syarat pelaksanaan seleksi terbuka	Pokja SDM
			b. Menyusun Standar Kompetensi		
			c. Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan		